

SKRIPSI

**EKSISTENSI PARTAI ISLAM PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019 DI
KABUPATEN MAMASA**



Disusun Oleh :

MARIA FRANSISKA IGNASIA

E111 15 504

PRODI ILMU POLITIK

DEPARTEMEN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

EKSISTENSI PARTAI ISLAM PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019

DI KABUPATEN MAMASA

Di susun dan diajukan oleh :

MARIA FRANSISKA IGNASIA

E 111 15 504


Akan dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi


Pada tanggal : 10 September 2021

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

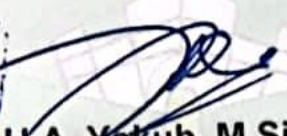

Drs. H.A. Yakub, M.Si. Ph. D.
NIP. 196212311990031023


Haryanto, S.IP. MA
NIP. 198610082019031009

Mengetahui :

Ketua Departemen Ilmu Politik




Drs. H.A. Yakub, M.Si. Ph. D.
NIP. 196212311990031023

**HALAMAN PENERIMAAN
SKRIPSI**

**EKSISTENSI PARTAI ISLAM PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019 DI
KABUPATEN MAMASA**

Di susun dan diajukan oleh:

MARIA FRANSISKA IGNASIA

E111 15 504

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi

Pada program studi Ilmu Politik

Departemen Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, pada 17 Oktober 2021

Menyetujui

Panitia Ujian

Ketua : Drs. H. A.Yakub, M.Si.,Ph.D.

(.....)

Sekretaris : Haryanto, S.IP, M.A.

(.....)

Anggota : Dr. Gustiana, S.IP, M.Si.

(.....)

Anggota : Dr. Ariana Yunus, M.Si.

(.....)

Pembimbing 1 : Drs. H. A.Yakub, M.Si.,Ph.D.

(.....)

Pembimbing 2 : Haryanto, S.IP, M.A.

(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Maria Fransiska Ignasia

Nim : E111 15 504

Program studi : Ilmu Politik

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya berjudul :

“Eksistensi partai Islam pada Pemilu Legislatif tahun 2019 di Kabupaten Mamasa” adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain. Skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri .

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 17 Oktober 2021

Yang menyatakan

Maria Fransiska Ignasia



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa kebenaran yang ada dalam skripsi ini adalah kebenaran subjektif bagi diri penulis. Untuk itu, perbedaan pendapat mengenai kandungan skripsi ini adalah hal yang wajar dan justru yang menjadi tugas kita semua adalah berusaha mengkaji kembali sehingga kebenaran hakiki dapat kita peroleh.

Penulis menyadari bahwa mungkin inilah hasil yang maksimal yang dapat disumbangkan. Penulis juga menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan sehingga penulis selalu menyediakan ruang untuk menampung kritik dan saran dari semua pihak demi pencapaian kesempurnaan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta bapak Juventius Ganti yang selalu senantiasa mengingatkan saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan

Ibu Magdalena Tumba Pamiring yang telah senantiasa memberi curahan kasih sayang, doa, dan nasehatnya, penulis takkan bisa meminta lebih dari apa yang mereka berikan karena mereka adalah hal terbaik yang bisa saya bayangkan. Segenap ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada kalian yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik hingga sekarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, bimbingan, dorongan serta saran-saran dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang senantiasa memberikan dukungannya dari awal hingga akhir. Ucapan terima kasih penulis haturkan dari lubuk hati terdalam kepada Drs. A. Yakub, M.Si., Ph.D selaku Pembimbing I sekaligus penasehat akademik bagi penulis dan Haryanto, S.IP. MA selaku pembimbing II. Terima kasih karena telah membantu penulis dalam memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Hj. Dwia Aries Tina NK, MA, Selaku Rektor Universitas Hasanudduin Makassar beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Armin Arsyad selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, yang telah memberi kesempatan

kepada penyusun untuk menuntut ilmu di Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

3. Bapak Drs. A. Yakub, M.Si., Ph.D. selaku Ketua Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
4. Bapak A. Ali Armunanto, S.IP., M.Si. selaku Sekretaris Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
5. Kepada Bapak dan Ibu dosen penulis di Program Studi Ilmu Politik, Alm. Prof. Dr. M. Kausar Bailusy, Alm. Prof. Dr. Basyir Syam, Prof. Dr. Muhammad, M.Si. Dr. Ariana Yunus, S.IP,M.Si. Drs. H. A. Yakub, M.si, Dr. Phil Sukri M.Si, Dr. Gustiana S.IP.M.SI., Sakinah Nadir, S.IP. M.SI, Imran S.IP. M.Si, Endang Sari, S.IP, M.SI, Zulhajar S.IP. MA., Haryanto, S.IP. MA., dan Ummi Suci Fathia B. S.IP, M.Si Terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan.
6. Seluruh Staf Akademik Departemen Ilmu Politik yang telah memberikan bantuan jasa dalam bidang keadministrasian kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
7. Seluruh informan yang telah bersedia meluangkan waktunya kepada penulis untuk memberikan informasi dan data sampai pada penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada kelima saudara saya Nubin, Linmey, Kimon, Ici, Deo beserta Keluarga besar saya yang tidak bisa saya sebut satu

persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih sudah selalu memberikan nasihat positif dan dukungan selama ini.

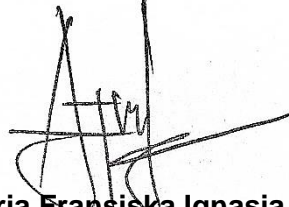
9. Untuk sosok yang selalu hadir dan selalu menjadi penyemangat bagi penulis Marco Pongarrang S.IP semoga harapan dan cita-cita kita bersama bisa terwujud.
10. Terima kasih Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (Himapol FISIP Unhas) yang telah menjadi wadah pembelajaran di luar perkuliahan, dan telah berkontribusi besar dalam pengembangan diri penulis selama berkuliah. Himapolku, Himapolmu, Himapol Kita Semua.
11. Bem Kema Fisip Unhas yang telah menjadi wadah pembelajaran di luar perkuliahan, dan telah berkontribusi besar dalam pengembangan diri penulis selama berkuliah. Bersama, Bersatu Beraya.
12. Kepada saudara-saudara angkatan Delegasi 2015, Poces, Syifa, Ayu, Liza, Dika, Fira, Susi, Astmha, Aswita, Nisa, Dilla, Nindy, Vivi, Dika, Nita, Ningrat, Evi, Upi, Dery, Evita, Syawal, Ime, Rahmat Rohyat, Marwah, Ubay, Ari, Adi, Kamal, Ical, Juned, lin, Sibga, Mira, Ifan, rahmat renaldy, Syarif, Asrunil, Galank, Fichri, Dianto, Jonny, Wahyudin. Terima kasih telah menjadi saudara yang baik dalam perjalanan belajar bersama di Ilmu Politik Fisip Unhas.

13. Terima kasih kepada editor penulis yang selalu membantu dalam perjalanan penulisan skripsi ini Nurhaliza S.IP dan Akbar Najemuddin S.IP.
14. Kepada teman-teman KKN gelombang 99, Jusma, Ina, Rasmi, Asdar, Alam, Fade yang memberi banyak pengalaman, pembelajaran. Dimana keseruan, suka-duka yang dilewati bersama, saling membagi pengalaman dan ilmu bersama, dan sebagainya.
15. Untuk teman-teman dekat saya Liza, Nita, lin, Upi, Aswita, Susi terima kasih dorongan yang sudah diberikan kepada saya selama ini hingga saya mampu bangkit kembali untuk semangat menjalankan tugas kuliah.
16. Untuk Rumah Ide Group, Readtimes.id, Active Advertising, Kopi Ide yang selama ini telah memberi ruang hidup kepada penulis.
17. Terima kasih kepada PMKO FISIP Unhas yang telah menjadi rumah berbagi kasih selama menjadi mahasiswa.
18. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada teman-teman selalu ceria yang tentunya selalu hadir memberikan keceriaan Eki, Gazali, Tommy, Anggun, Wawan, Andes, Akbar, Mukmin, dan Yayat.

Serta kepada semua insan yang tercipta dan pernah berhubungan dengan penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Sekali lagi penulis ucapkan terima kasih atas segala bantuan,

perhatian, dukungan, bimbingan dan kerja samanya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

Makassar, 10 September 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Maria Fransiska Ignasia', written over a faint circular stamp.

Maria Fransiska Ignasia
NIM. E111 15 504

ABSTRAK

Maria Fransiska Ignasia, No pokok E 111 15 504, dengan judul “Eksistensi Partai Islam di Kabupaten Mamasa pada Pemilihan Umum Tahun 2019”. Di bawah pembimbingan Drs. H. A. Yakub, M.Si, Ph.D sebagai pembimbing I dan Haryanto, SIP. MA sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan partai politik Islam di Kabupaten Mamasa pada pemilu tahun 2019. Serta mengetahui bagaimana penerimaan masyarakat di Kabupaten Mamasa terhadap partai Islam. Adapun pendekatan yang digunakan dalam melakukan analisis yaitu pendekatan perilaku pemilih, teori ini digunakan untuk menjelaskan tentang perilaku pemilih di Kabupaten Mamasa dan konsep partai politik, konsep partai politik digunakan untuk melihat bagaimana tipologi partai – partai politik.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Mamasa. Dasar pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dengan menggunakan tipe deskriptif analisis yaitu penelitian diarahkan untuk menggambarkan fakta dengan argumen yang tepat. Dalam melakukan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada informan yang ada di Kabupaten Mamasa.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan partai politik yang berasaskan Islam di Kabupaten Mamasa adalah, merekrut kandidat dari kalangan nonmuslim dan mencitrakan diri sebagai partai pluralis. Sementara penerimaan masyarakat terhadap partai politik Islam di Kabupaten Mamasa dikarenakan asas partai tidak mempengaruhi perilaku pemilih dan isu identitas agama tidak mempengaruhi perilaku pemilih.

Kata kunci: Pileg, Partai Politik, Perilaku Pemilih

ABSTRAK

Maria Fransiska Ignasia, principal No. E 111 15 504, with the title "The existence of an Islamic party in the 2019 Legislative Election in Mamasa Regency". Under the guidance of Drs. H. A. Yakub, M.Si, Ph.D as supervisor I and Haryanto, SIP. MA as supervisor II.

This study aims to find out how the strategy is carried out by Islamic political parties in Mamasa Regency in the 2019 elections. And to find out how the acceptance of the community in Mamasa Regency towards Islamic parties. The approach used in conducting the analysis is the approach to voter behavior, this theory is used to explain voter behavior in Mamasa district and the concept of political parties, the concept of political parties is used to see how the typology of political parties is.

This research was conducted in Mamasa District. The basic research approach used in this study is a qualitative method. By using a descriptive type of analysis, the research is directed to describe the facts with the right arguments. In collecting data, it was carried out by in-depth interviews with informants in Mamasa District

The results of this study indicate that the strategy adopted by political parties based on Islam in Mamasa Regency is to recruit candidates from non-Muslim circles and image themselves as a pluralist party. Meanwhile, public acceptance of Islamic political parties in Mamasa Regency is because the party principle does not affect voter behavior and the issue of religious identity does not affect voter behavior.

Keywords: Legislative Elections, Political Parties, Voter Behavior

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat penelitian :	7
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	7
1.4.2 Manfaat praktis :	8
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Partai Islam di Indonesia	9
2.1.2 Tipologi Partai Politik	14
2.2 Konsep Perilaku Pemilih.....	15
2.2.1 Pendekatan Sosiologis.....	17
2.2.2 Pendekatan Psikologis	19
2.2.3 Pendekatan Rasional	21
2.3 Tinjauan umum tentang Perilaku Pemilih di Indonesia	24
2.4 Kerangka Pemikiran	28

2.5 Skema Pikir	30
BAB III.....	31
METODE PENELITIAN.....	31
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	31
3.2 Dasar dan Tipe Penelitian	31
3.2.2 Tipe Penelitian.....	31
3.3 Informan Penelitian.....	32
3.4 Jenis dan Sumber Data	32
3.4.1 Data Primer	33
3.4.2 Data Sekunder	33
3.5 Teknik Pengumpulan Data	33
3.5.1 Wawancara Mendalam.....	34
3.5.2 Arsip/Dokumen	34
3.6 Teknik Analisis Data	35
BAB IV	37
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	37
4.1 Profil Singkat Kabupaten Mamasa.....	37
4.2 Demografi Penduduk Kabupaten Mamasa.....	38
4.2.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Sebaran Kecamatan.....	38
4.2.2 Penduduk Berdasarkan Keyakinan	40
4.3 Dinamika Politik Kabupaten Mamasa	41
4.3.1 Pilkada Kabupaten Mamasa.....	41
4.4 Pemilu Serentak 2019 Kabupaten Mamasa	46
4.4.1 Daftar Pemilih dan Tingkat partisipasi	46
4.4.2 Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik.....	48

4.4.3 Hasil Perolehan Suara Partai Berbasis Islam di Kabupaten Mamasa.....	49
BAB V	52
HASIL DAN PEMBAHASAN	52
5.1 Merekrut Kandidat Dari Kalangan Nonmuslim	54
5.2 Mencitrakan Diri Sebagai Partai Pluralis	60
5.3 Asas Partai Tidak Mempengaruhi Perilaku Pemilih	63
BAB VI	71
KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan	71
B. SARAN.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menguraikan tentang eksistensi partai Islam pada pemilihan umum tahun 2019 di kabupaten Mamasa. Kabupaten Mamasa merupakan salah satu kabupaten yang mayoritas penduduknya beragama non muslim. Namun keberhasilan partai politik yang berasaskan Islam di daerah tersebut menjadi menarik untuk diteliti dikarenakan perolehan kursi partai Islam di atas 30%. Tentunya kondisi ini berbanding terbalik dengan isu identitas politik yang dibangun oleh partai – partai tersebut.

Keberadaan partai Islam menjadi salah satu penanda terbukanya keran-keran kebebasan di era Reformasi. Kebangkitan politik aliran Islam melandaskan saluran aspirasi politik umat Islam tidak lagi hanya bermuara kepada PPP saja. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya partai yang beraliran Islam mengikuti pemilu pasca lengsernya kekuasaan politik orde baru. Keikutsertaan partai Islam pada pemilu pertama pasca orde baru sampai pada pemilihan tahun 2019 memperlihatkan kekuatan politik partai Islam dalam meraih dukungan pemilih. Sekalipun popularitas dan elektabilitasnya belum mampu menyaingi partai-partai nasionalis (seperti

PDIP, Partai Golkar dan Gerindra), lebih lanjut hal itu dapat dilihat dari perolehan suara partai-partai Islam dari pemilu 1999-2019. ¹

PARTAI	HASIL PEMILU 1999 SAMPAI 2019				
	1999	2004	2009	2014	2019
PKB	51	52	26	47	58
PAN	34	53	42	49	44
PPP	58	58	39	39	19
PKS	7	45	59	40	50
PBB	13	11	0	0	0

Berdasarkan dari tabel diatas terlihat perolehan suara partai Islam yang mengikuti pemilu pada tahun 1999 sampai 2019 masih berada pada posisi partai papan tengah. Kemampuan partai yang berbasis Islam belum mampu menggeser posisi partai-partai nasionalis di papan atas. Salah satu faktor yang menyebabkan perolehan kursi Islam masih sampai pada level partai papan menengah salah satunya adalah akibat kesulitan partai-partai Islam dalam mendapatkan suara dan dukungan dari pemilih non muslim, hal itu bisa dilihat dari pembasisan partai partai tersebut.

Walaupun demikian partai-partai Islam tersebut tetap berusaha mendulang suara di tingkat regional maupun nasional. Salah satu cara mendulang suara adalah dengan mengusung kader-kader terbaiknya

¹ Tabel diolah dari sumber KPU

dalam perhelatan Pemilu Legislatif baik regional maupun nasional. Selain mengusung kader kader terbaiknya partai-partai Islam juga menguatkan isu kampanye politik berbasis segmen identitas keagamaan hal itu banyak dilakukan oleh beberapa elit - elit partai Islam saat kampanye pada pemilu tahun 2019.

Corak politik identitas keagamaan digunakan pada kedua kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden Bersama partai pendukungnya. Hal ini dilakukan untuk lebih mengharapkan dukungan dari ceruk pemilih Islam. Pemilih kelompok non muslim tentunya menjadi tidak nyaman dan merasa Secara tidak langsung isu identitas keagamaan yang dibangun oleh partai politik yang berbasis Islam akan sangat merugikan partainya sendiri. Khususnya di wilayah yang penduduknya mayoritas beragama non muslim.

Sulawesi selatan misalnya yang terdapat dua kabupaten yang penduduknya mayoritas nasrani yaitu tana toraja dan toraja utara. Menjadikan partai-partai Islam susah untuk mendapatkan suara pemilih dimana berdasarkan data dari situs KPU perolehan suara partai Islam ditanah toraja hanya mencapai 4,36% dan toraja utara 0,59%.² Rendahnya perolehan suara partai-partai Islam tersebut disebabkan kerena adanya beberapa partai Islam yang tidak mampu mengusung kandidat pada pileg 2019 lalu.

² <https://pemilu2019.kpu.go.id/#/dprd kab/rekapitulasi/>

Namun kondisi berbeda terjadi di Kabupaten Mamasa provinsi Sulawesi barat dimana partai - partai Islam meraup suara yang cukup signifikan di kabupaten tersebut yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara sekaligus berbatasan langsung antara Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat memiliki jumlah penduduk 149.809 orang.

Mayoritas penduduk di kabupaten ini adalah Kristen Protestan dengan persentase 75,36%, sedangkan Muslim diperkirakan 12,86% atau 23.078 orang dibandingkan dengan populasi umat Kristiani yang mencapai 104,480 orang.³ Selama dua periode atau sepuluh tahun sudah, Bupati Ramlan Badawi yang adalah seorang Muslim telah memimpin kabupaten dengan 17 kecamatan tersebut. Bahkan dalam pemilihan kedua pada tahun 2018, ia menjadi kandidat tunggal dan memenangkan pemilihan dengan persentase mencapai 61,22% atau dipilih oleh 48.552 pemilih.

Pemilu tahun 2019 menjadikan Mamasa salah satu kabupaten yang mayoritas pemilihnya nasrani, namun perolehan suara partai Islam cukup signifikan. Perolehan suara partai Islam dikabupaten tersebut apabila diakumulasikan maka secara keseluruhan partai Islam mendapatkan 30% lebih perolehan kursi dari jumlah kursi di DPRD

³ Rahmad M. Arsyad and Endang Sari PEACE CONSENSUS OF THE POLITICAL IDENTITY IN MAMASA DISTRICT

Mamasa sebanyak 30 kursi.⁴ Adapun perolehan kursi partai-partai Islam di Kabupaten Mamasa sebagai berikut.

Table 1 perolehan suara partai Islam di Kabupaten Mamasa

Partai	Kursi	Nama	Dapil
PKS	3	Juan Gayang Pongtiku	1
		Junuriah	2
		Adam Dualangi	3
PKB	3	Suhadi Kandoa	1
		Mangguali	2
		Muh Sapri	3
PPP	2	Darius To'tuan	1
		Reskianto Taula'bi	2
PAN	2	Simon Gayang	1
		Djidon	3
Total	10		

Berdasarkan tabel diatas, perolehan kursi Partai Keadilan Sejahtera sebanyak tiga kursi yang tersebar dari tiga dapil yang ada, begitu pun dengan Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh tiga kursi dilegislatif Kabupaten Mamasa. Sementara Partai Persatuan

⁴ <https://pemilu2019.kpu.go.id/#/dprdkab/rekapitulasi/>

Pembangunan dan Partai Amanat Nasional masing – masing memperoleh dua kursi. Hanya partai Bulan Bintang yang juga merupakan peserta pemilu tidak mendapatkan kursi di DPRD Mamasa.

Fenomena politik di Kabupaten Mamasa ini dengan perolehan suara partai Islam sebagai kelompok minoritas atas mayoritas, merupakan gejala yang bertolak belakang dengan panasnya konflik politik identitas di arena Pemilihan umum tahun 2019. Termasuk pada pemilihan kepala daerah pada sejumlah daerah Indonesia, seperti Pilkada DKI Jakarta yang dibangun oleh poros partai-partai Islam.

Berangkat dari fenomena yang terjadi pada pemilihan legislatif tahun 2019 di Kabupaten mamasa. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul “**Eksistensi Partai Islam pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Mamasa**”. Dengan melakukan penelitian studi kasus terhadap perolehan suara partai-partai islam di Kabupaten Mamasa pada pemilihan umum tahun 2019. Dengan melihat luasnya cakupan dari tema penelitian ini maka penulis membatasinya dengan rumusan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian yang menjadi fokus perhatian adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana strategi partai – partai Islam dalam memperoleh kursi pada pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Mamasa.
- 2) Bagaimana sikap dan orientasi perilaku pemilih terhadap partai Islam di Kabupaten Mamasa pada pemilihan umum tahun 2019

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan partai-partai Islam dalam memperoleh suara pada pemilihan tahun 2019 di Kabupaten Mamasa.
- 2) Mengetahui bagaimana sikap dan penerimaan masyarakat terhadap partai-partai Islam di Kabupaten Mamasa.

1.4 Manfaat penelitian :

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a) Menjawab fenomena sosial-politik terkait dengan isu politik identitas yang ada khususnya dalam pemilihan tahun 2019 di Kabupaten Mamasa.
- b) Menunjukkan secara ilmiah mengenai sikap dan perilaku politik masyarakat mamasa.
- c) Memperkaya khasanah kajian Ilmu politik untuk perkembangan keilmuan, khususnya politik kontemporer.

1.4.2 Manfaat praktis :

- a) Memberikan bahan rujukan bagi yang berminat dalam memahami realitas perilaku dan sikap pemilih masyarakat Kabupaten Mamasa.
- b) Memberikan informasi kepada partai-partai Islam dalam memenangkan pemilu di basis pemilih kristen.
- c) Salah satu prasyarat memperoleh gelar sarjana ilmu politik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini penulis akan menguraikan tentang konsep. Teori dan pendekatan yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini. Terkait dengan tentang **“Eksistensi Partai Islam pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Mamasa”**. Dengan melakukan penelitian studi kasus terhadap perolehan suara partai-partai Islam di Kabupaten Mamasa pada pemilihan umum tahun 2019. Sehingga penulis dapat menganalisis masalah dengan menggunakan tinjauan tentang teori partai politik, teori perilaku memilih serta konsep politik identitas. sekaligus menjadi landasan kerangka berfikir dalam pelaksanaan penelitian yang akan dilanjutkan selanjutnya.

2.1. Partai Islam di Indonesia

Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara.⁵ berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi mereka bisa menyatukan orang - orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan oreintasinya dapat dikonsolidasikan. Pandangan Robert Huckshon memberikan sebuah “defenisi pragmatis” tentang partai dalam buku teksnya *Political Parties in America*: “Partai politik adalah sebuah

⁵ Budiarjo Miriam, *“Dasar-Dasar Ilmu politik”* Gramedia Pustaka Utama (Jakarta : 2008) hal 397.

kelompok otonom warga Negara yang mempunyai tujuan ikut dalam pencalonan dan bersaing di pemilihan umum dengan harapan untuk mendapatkan control atas kekuasaan pemerintahan melalui penguasa jabatan publik dan organisasi pemerintahan. Bagi Huckshon, *raison d'etat* untuk memiliki partai politik adalah sederhana partai adalah sarana yang diperlukan untuk memenangi pemilu dan memimpin pemerintahan.⁶

Menyadari pentingnya keberadaan partai politik dalam sistem politik modern maka pemerintah Indonesia lewat wakil presiden mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden No.X tahun 1945 yang memperbolehkan berdirinya partai-partai politik. umat Islam merespon Maklumat tersebut dengan mendirikan partai politik Masyumi. Berdirinya Masyumi ini dimaksudkan sebagai satu-satunya partai politik yang akan memperjuangkan aspirasi dan nasib umat Islam Indonesia. Partai politik ini didukung, antara lain, oleh dua kekuatan ormas besar Islam, yaitu NU dan Muhammadiyah. Namun dalam perjalanannya, para pendukung partai Masyumi keluar satu persatu. Bermula dengan keluarnya PSII tahun 1947, menyusul kemudian NU tahun 1952.⁷ Akibatnya pada Pemilu 1955, yang merupakan pemilu pertama semenjak Indonesia merdeka, kekuatan politik Islam menjadai terpecah-pecah, bukan hanya Masyumi, NU, PSII, Perti,

⁶ Richard s. Katz Dan William Crotty, Handbook Partai Politik 2014, Bandung : Nusa Media. Hlm 3.

⁷ Keluarnya NU dari Masyumi karena perebutan kursi Menteri Agama, yang seharusnya diberikan kepada NU bukan kepada Muhammadiyah. Lihat Deliar Noer, Partai Islam di Pentas Nasional, (Jakarta: Grafitipers, 1987).

tetapi juga ada PPTI, dan AKUI. Tentu saja perpecahan di kalangan partai-partai Islam ini mengakibatkan kekuatan Islam menjadi lemah.

Ketika Orde Baru tampil memegang kendali kekuasaan, umat Islam mempunyai harapan besar akan tampilnya kembali Masyumi. Harapan itu berubah menjadi kekecewaan karena rezim Orde Baru tidak memperbolehkan Masyumi tampil kembali sebagai partai politik. Sebagai gantinya, rezim Orde Baru mengizinkan berdirinya Parmusi. Itupun dengan catatan: tokoh-tokoh eks-Masyumi dilarang terlibat dalam kepemimpinan partai.⁸ Tindakan pemerintah ternyata tidak hanya sampai di situ. Demi alasan menciptakan stabilitas politik sebagai prasyarat pembangunan ekonomi, Orde Baru kemudian melakukan restrukturisasi sistem kepartaian (fusi partai) Dengan adanya kebijaksanaan ini, partai-partai Islam (Parmusi, NU, PSII, dan Perti) dan juga partai-partai yang lainnya (PNI, Partai Katolik, Parkindo, dan IPKI) dipaksa melakukan fusi. Keempat partai Islam yaitu Parmusi, NU, PSII dan Perti bergabung dalam wadah Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dengan demikian PPP merupakan satu-satunya kekuatan politik Islam.

Gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa, tidak hanya berhasil menumbangkan kekuasaan soeharto, lebih jauh gerakan reformasi telah melahirkan ledakan partisipasi politik. Ledakan partisipasi politik itu bukan hanya menimpa kalangan masa akar rumput tetapi juga

⁸ Fachry Ali dan Bahtiar Effendy, *Merambah Jalan baru Islam*, (Jakarta: Mizan, 1986), hlm. 108

menghinggapi kalangan elite politik. Sebagai perwujudan dari ledakan partisipasi politik itu, para elite politik berlomba-lomba mendirikan atau menghidupkan kembali partai politik, tak terkecuali elite Islam. Partai-partai politik Islam yang muncul pada era reformasi pada saat itu yang mendaftarkan diri untuk ikut pemilu sebanyak 32 parpol. Namun dari jumlah tersebut yang lolos Pemilu 1999 sebanyak 19 partai, yaitu PPP, PBB, PK, PKB, PAN , PUI, PSH, PSII 1905, PNU, PKU, Partai Politik Islam Masyumi, PMB, PAY, PID, PDB, KAMI, PP, PUMI, dan Partai SUNI.

Fenomena berdirinya partai-partai politik, khususnya yang berbasis Islam, dianggap sebagai bangkitnya politik aliran. Dikatakan sebagai bangkitnya kembali politik aliran karena selama Orde Baru, politik aliran diberangus. Pada masa itu, rezim Orde Baru melakukan kebijakan dealiranisasi dengan serangkaian kebijakan: depolitisasi massa, floating mass, dan de-ideologisasi dengan memberlakukan Pancasila sebagai asas tunggal. Kini setelah rezim Orde Baru jatuh, aliran-aliran politik itu, termasuk aliran politik Islam, bangkit kembali dengan wujud berdirinya partai-partai politik Islam. Sehubungan dengan itu, Th. Sumartana mengemukakan beberapa hal yang menyebabkan munculnya partai politik berdasarkan agama. Pertama, karena agama itu sendiri memiliki dukungan teologis untuk mencapai cita-cita berdasarkan gagasan-gagasan keagamaan yang dipercayai. Kedua, karena ikatan politik dari para warganya menyebabkan agama sebagai faktor pengikat untuk mendukung pemimpin dari kelompok agama tersebut. Ketiga, karena

umat agama tersebut merasa lebih nyaman dengan pemimpin politik yang lahir dari komunitasnya sendiri dan tidak percaya manakala politik dikuasai oleh golongan agama lain.⁹

Kelahiran partai politik yang berbasis Islam diawal reformasi begitu banyak namun sampai saat ini kemampuan partai Islam belum mampu mengeser kekuatan politik yang beraliran nasional. Hal itu dapat dilihat dari beberapa pemilu pasca reformasi hanya beberapa partai yang berbasis Islam yang mampu bertahan diantaranya PKB, PPP, PAN , PKS dan PBB, sementara partai Bulan Bintang dari pemilu 2009 sampai 2019 ikut pemilu namun tidak mampu menembus angka parlement treshoeld.

Secara umum kateogori penegasan ideology kepartaiaan di Indonesia saat ini terbagi dalam tiga fatsun ideology politik atau dalam konteks Indonesia lebih dikenal dengan asas kepartaiaan. Sejauh ini kalau kita melihat nilai dan basis kader yang dibangun oleh partai politik kita bisa dikategorikan dalam tiga kateogori tipologi partai politik di Indonesia apabila dilihat dalam sistem dan mekanisme keanggotaannya dapat dibagi menjadi tiga, *Pertama* Partai Islam tertutup (keanggotaannya lebih diutamakan penduduk beragama Islam). Misal: PPP, PBB, PKS. *Kedua*, Partai Islam terbuka (berbasis kultur Islam dan organisasi massa Islam, tetapi proses rekrutmen anggota bersifat terbuka). Misal: PAN

⁹ Th. Sumartana, "Menakar Signifikansi Partai Politik Agama dan Partai Pluralis dalam Pemilu 1999 di Indonesia", dalam, Arief Subhan, ed., Indonesia Dalam Transisi Menuju Demokrasi, (Jakarta: LSAF, 1999), hlfn.101

(Muhammadiyah), PKB (NU). *Ketiga*, Partai kebangsaan yang berwatak pluralisme dan netral agama. Misal: PDIP, Golkar, Demokrat, Gerindra, Nasdem.

2.1.2 Tipologi Partai Politik

Partai politik sebagai sarana demokrasi tentunya memiliki tipologi berbeda-beda. Klasifikasi partai politik menurut Katz dan Mair membagi tipe partai politik menjadi 4 tipe¹⁰, yaitu :

- 1 Partai Elit. Partai jenis ini berbasis lokal, dengan sejumlah elit inti yang menjadi basis kekuatan partai. Dukungan bagi partai elit ini bersumber pada hubungan client (anak buah) dari elit-elit yang duduk di partai ini. Biasanya, elit yang duduk di kepemimpinan partai memiliki status ekonomi dan jabatan yang terpandang. Partai ini juga didasarkan pada pemimpin-pemimpin faksi dan elit politik, yang biasanya terbentuk di dalam parlemen.
- 2 Partai Massa. Partai jenis ini berbasiskan individu-individu yang jumlahnya besar, tetapi kerap tasingkirkan dari kebijakan negara. Partai ini kerap memobilisasi massa pendukungnya untuk kepentingan partai. Biasanya, partai massa berbasiskan kelas sosial tertentu, seperti “orang kecil”, tetapi juga bisa berbasis

¹⁰ Richard s. Katz Dan William Crotty, Handbook Partai Politik 2014, Bandung : Nusa Media. Hlm 410

agama. Loyalitas kepada partai lebih didasarkan pada identitas sosial partai ketimbang ideologi atau kebijakan.

- 3 Partai Catch-All. Partai jenis ini di permukaan hampir serupa dengan Partai Massa. Namun, berbeda dengan partai massa yang mendasarkan diri pada kelas sosial tertentu, Partai Catch-All mulai berpikir bahwa dirinya mewakili kepentingan bangsa secara keseluruhan. Partai jenis ini berorientasi pada kemenangan Pemilu sehingga fleksibel untuk berganti-ganti isu di setiap kampanye. Partai Catch-All juga sering disebut sebagai Partai Electoral-Professional atau Partai Rational-Efficient.
- 4 Partai Kartel. Partai jenis ini muncul akibat berkurangnya jumlah pemilih atau anggota partai. Kekurangan ini berakibat pada suara mereka di tingkat parlemen. Untuk mengatasi hal tersebut, pimpinan- pimpinan partai saling berkoalisi untuk memperoleh kekuatan yang cukup untuk bertahan. Dari sisi Partai Kartel, ideologi, janji pemilu, basis pemilih hampir sudah tidak memiliki arti lagi.

2.2 Konsep Perilaku Pemilih

Joko J, Prihatmoko juga menjelaskan bahwa pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka mempengaruhi dan meyakinkan agar mendukung dan kemudian memberi suaranya kepada kontestan yang bersangkutan. Konstituen

adalah kelompok masyarakat yang merasa diwakili oleh suatu ideologi tertentu yang kemudian termanifestasi dalam institusi politik seperti partai politik.¹¹

Prof. Miriam Budiarjo mendefinisikan perilaku pemilih sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan cara memilih pemimpin negara dan secara atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan Pemerintah (*public policy*)¹². Sementara itu menurut Surbakti perilaku pemilih adalah aktivitas pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih dan tidak memilih dalam suatu pemilu, maka *voters* akan memilih atau mendukung kandidat tertentu. A.A. Oka Mahendra perilaku pemilih adalah tindakan seseorang ikut serta dalam memilih orang, partai politik atau isu publik tertentu. Dari konsep yang dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa perilaku pemilih merupakan tindakan pemilih terkait menentukan suatu pilihan secara langsung.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perilaku pemilih merupakan tindakan seseorang untuk memberikan suara dalam pemilihan umum, dimana yang menjadi perhatian adalah mengapa seorang pemilih. memilih atau memberikan suaranya pada partai tertentu atau kandidat tertentu.

¹¹<http://digib.unila.ac.id/7604/14BAB%20II.pdf>

¹²Miriam Dasar-Dasar Ilmu Politik.2013. jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama (diakses pada tanggal 18 septembar 2018)

Study tentang perilaku memilih mengenai alasan dan faktor yang menyebabkan seseorang memilih suatu partai atau kandidat yang ikut serta dalam kontestasi politik. Secara *teoritis*, perilaku memilih dapat diurai dalam tiga pendekatan utama, yaitu masing-masing pendekatan sosiologis, psikologis dan pilihan rasional.

Penjelasan-penjelasan *teoritis* tentang *voting behavior* didasarkan pada dua model atau pendekatan yaitu model/pendekatan sosiologi dan model/pendekatan psikologi. Di lingkungan ilmuan sosial Amerika Serikat, model pertama disebut sebagai mazhab *Columbia (the columbi school olektoral behavior)*, sementara model kedua disebut sebagai mazhab *Michigan (the Michigan Survey Risearch Center)*.

Mazhab pertama lebih menekankan peranan faktor-faktor sosiologis dalam bentuk perilaku politik seseorang, sementara mazhab kedua lebih mendasarkan faktor psikologis seseorang dalam menentukan perilaku politiknya.¹³ Dari kedua mazhab tersebut ada mazhab ketiga yang sangat berpengaruh dalam perilaku memilih yaitu mazhab dimana perilaku memilih lebih menekankan pada faktor-faktor rasionalitas.

2.2.1 Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis sebenarnya berasal dari negara Eropa, kemudian di Amerika. Karena itu, dia disebut sebagai model sosiologi politik Eropa. David Denver, ketika menggunakan pendekatan ini untuk

¹³Afan Gaffar Javaners Voters, "A Case Study of Election Under a Hegemonic Party System" (yogyakarta: Gaja Mada University press,1992) hal, 4-6

menjelaskan perilaku pemilih masyarakat Inggris, menyebutkan model ini sebagai *social determinism approach*. Pendekatan ini pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan-pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku pemilih seseorang. Karakteristik sosial (seperti pekerjaan, pendidikan, dsb) dan karakteristik atau latar belakang sosiologis (seperti agama, wilayah, jenis kelamin, umur, dsb) merupakan faktor penting dalam menentukan pilihan politik.

Pendek kata, pengelompokan sosial seperti umur (tua-muda), jenis kelamin (lelaki-perempuan), agama dan sebagainya dianggap mempunyai peranan yang cukup menentukan dalam membentuk pengelompokan sosial baik secara formal seperti keanggotaan seseorang dalam organisasi-organisasi keagamaan, pertemanan, ataupun kelompok-kelompok kecil lainnya yang merupakan sesuatu yang sangat vital dalam memahami perilaku politik seseorang, karena kelompok-kelompok inilah yang mempunyai peranan besar dalam membentuk sikap, persepsi dan orientasi seseorang.¹⁴ Ketika mencoba menghubungkan antara keanggotaan dalam suatu kelompok dengan perilaku politik seseorang menyederhanakan pengelompokan sosial itu kedalam tiga kelompok, yaitu kelompok primer, sekunder dan kategori. Gerald Pomper memberikan pengaruh pengelompokan sosial dalam

¹⁴Asfar Muhammad, "Pemilu dan Perilaku Pemilih 1955-2004". (Jakarta : Pustaka Eureka, 2006) h. 137-144

study Voting behavior kedalam variabel, yaitu variabel predisposisi sosial-ekonomi pemilih.

Menurutnya, prediposisi sosial-ekonomi pemilih dan keluarga pemilih mempunyai hubungan yang signifikan dengan perilaku memilih seseorang. preferensi-preferensi politik keluarga, apakah preferensi politik baik ayah atau preferensi ibu akan mempengaruhi pada preferensi anak. Predisposisi sosial-ekonomi ini bisa berupa agama yang dianut, tempat tinggal, kelas sosial, karakteristik, demografis dan sebagainya. Yang pendek kata ikatan-ikatan sosiologis semacam ini sampai sekarang secara teoritis masih cukup signifikan untuk melihat perilaku memilih.¹⁵

2.2.2 Pendekatan Psikologis

Pendekatan psikologis atau yang sering disebut juga mazhab michigan sebagaimana diungkap oleh A.A. Oka Mahendra bahwa “faktor-faktor sosiologis seperti kesamaan agama atau etnik tidak akan fungsional mempengaruhi keputusan pemilih, jika sejak awal belum terbentuk persepsi dan sikap pribadi pemilih terhadap faktor-faktor sosial yang diletakkan pada partai atau calon tertentu. Harus sudah terbentuk dalam diri pemilih bahwa dirinya termaksud dalam satu golongan atau segmen sosial tertentu, sekaligus terbentuk persepsi dari diri yang

¹⁵Gerald Pomper, “Voters of American Elektoral Behavior” (New York: Dod, Mead Company, 1978)hal,195-208

bersangkutan bahwa partai atau figur tertentu juga diidentikkan dengan kelompok atau segmen sosial yang sama dengan diri mereka".¹⁶

Faktor emosional sangat menentukan pembentukan perilaku memilih dalam pendekatan ini yang melibatkan peran keluarga dan lingkungan sekitar individu yang berperan aktif dalam proses sosialisasinya. Dalam hal ini juga pola hubungan yang merupakan bentuk budaya faktor ketokohan juga berpengaruh kuat dalam membentuk emosional dan perilaku pemilih. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pendekatan psikologis yaitu pendekatan yang melihat perilaku pemilih sebagai bentuk dari proses sosialisasi yang melahirkan ikatan emosional (identifikasi) yang mengarahkan tindakan politik seseorang dalam suatu pemilihan. Indikator yang digunakan untuk mengukur besarnya pendekatan ini adalah sebagai berikut :

1. Ketokohan, dilihat dari perasaan emosional pemilih yang melandasi pilihannya dengan mempertimbangkan identitas atau ketokohan calon (atau tokoh dibelakang calon) dan tokoh-tokoh panutan yang dihormati oleh pemimpin.
2. Identifikasi partai, yang dilihat dari kesamaan pandangan responden dengan anggota keluarganya terhadap pilihan tertentu serta adanya kesamaan antara partai yang dipilih dengan partai yang dikagumi.

¹⁶<https://www.google.co.id/search/ei=4EWIWrtSl8jSvAS206KQBQ&q=konsep+perilaku+memilih> (diakses pada tanggal 18 september 2018)

Bagi penganut pendekatan psikologi, konsep identifikasi partai ini dijadikan variabel sentral untuk menjelaskan perilaku memilih seseorang, sebagaimana yang diakui oleh Czudnowski, *“this aproach also particularly adequante for the analysis of voting in the united states, where’ party intification ‘ has been found to be the single most impartant variable determinising voting preferences”*.¹⁷

2.2.3 Pendekatan Rasional

Penggunaan pendekatan rasional dalam menjelaskan perilaku pemilih oleh ilmuwan politik sebenarnya diadaptasi dari ilmu ekonomi. Mereka melihat adanya analogi antara pasar (ekonomi) dan perilaku pemilih (politik). Apabila secara ekonomi masyarakat dapat bertindak secara rasional, yaitu mereka menekan ongkos sekecil-kecilnya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, maka dalam perilaku politik pun masyarakat akan dapat bertindak secara rasional, yakni memberikan suara kepartai politik yang dianggap mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan menekan kerugian.

Dalam konteks pilihan rasional, ketika pemilih merasa tidak mendapatkan faedah dengan memilih partai atau calon presiden yang tengah berkompetisi, maka ia tidak akan melakukan pilihan pada pemilu. Hal ini dilandaskan pada kalkulasi ekonomi, dimana perhitungan biaya

¹⁷Moshe M.Czudnowski, “Comparing Political Behavior” (London; Sage Publication, Inc., 1976) hal 76

yang dikeluarkan lebih besar dengan apa yang akan didapatnya kelak, maka jalan terbaik bagi pemilih adalah melakukan kegiatan atau aktivitas kesehariannya. Pendekatan ini juga mengandaikan bahwa calon presiden atau partai yang bertanding akan berupaya dan berusaha untuk mengemukakan berbagai program untuk menarik simpati dan keinginan pemilih. Namun, apabila partai ataupun calon presiden itu gagal mempromosikan programnya pada pemilih, maka pilihan untuk tidak memilih adalah rasional bagi pemilih. Oleh karena itu pada Pemilu tahun 2008 sistem pemilihan diubah dan mempersilahkan rakyat untuk ikut andil memilih pasangan presiden yang mereka anggap dapat memberikan harapan. Layaknya seorang pembeli di pasar, pemilih melakukan pilihan dengan cermat bukan hanya dalam memilih presiden tetapi juga anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).¹⁸ Adapun bagian dari pendekatan rasional dapat dilihat dengan tiga cara pandang dan Jenis-Jenis memilih antara lain sebagai berikut:

1. Pemilih Rasional

Pemilih dalam hal ini mengutamakan kemampuan partai politik atau calon peserta pemilu dengan program kerjanya, mereka melihat program kerja tersebut melalui kinerja partai atau kontestan dimasa lampau, dan tawaran program yang diberikan sang calon atau partai

¹⁸ Asfar Muhammad, "Pemilu dan Perilaku Pemilih 1955-2004". (Jakarta : Pustaka Eureka, 2006) h. 137-144

politik dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang sedang terjadi. Pemilih jenis ini memiliki ciri khas yang tidak begitu mementingkan ikatan ideologi kepada suatu partai politik atau seorang kontestan. Hal yang terpenting bagi pemilih jenis ini adalah apa yang bisa dan yang telah dilakukan oleh sebuah partai atau seorang kontestan pemilu.¹⁹

2. Pemilih Kritis

Proses untuk menjadi pemilih ini bisa terjadi melalui dua hal yaitu pertama, jenis pemilih ini menjadikan nilai ideologis sebagai pijakan untuk menentukan kepada partai atau kontestan pemilu mana mereka akan berpihak dan selanjutnya mereka akan mengkritisi kebijakan yang akan atau yang telah dilakukan. Kedua, bisa juga terjadi sebaliknya dimana pemilih tertarik dahulu dengan program kerja yang ditawarkan sebuah partai atau kontestan pemilu baru kemudian mencoba memahami nilai-nilai dan faham yang melatarbelakangi pembuatan sebuah kebijakan. Pemilih jenis ini adalah pemilih yang kritis, artinya mereka akan selalu menganalisis kaitan antara ideologi partai dengan kebijakan yang akan dibuat.

3. Pemilih Tradisional

Jenis pemilih ini memiliki orientasi ideologi yang sangat tinggi dan tidak terlalu melihat kebijakan partai politik atau seorang kontestan sebagai sesuatu yang penting dalam pengambilan keputusan. Pemilih

¹⁹Asfar Muhammad, "Pemilu dan Perilaku Pemilih 1955-2004". (Jakarta : Pustaka Eureka, 2006) h. 144-149

tradisional sangat mengutamakan kedekatan sosial-budaya, nilai, asal-usul, paham dan agama sebagai ukuran untuk memilih sebuah partai politik atau kontestan pemilu. Kebijakan yang berhubungan dengan masalah ekonomi, kesejahteraan, pendidikan dan lainnya dianggap sebagai prioritas kedua. Pemilih jenis ini sangat mudah dimobilisasi selama masa kampanye, pemilih jenis ini juga memiliki loyalitas yang sangat tinggi. Mereka menganggap apa saja yang dikatakan oleh seorang kontestan pemilu atau partai politik kebenaran yang tidak bisa ditawar lagi.²⁰

2.3 Tinjauan umum tentang Perilaku Pemilih di Indonesia

Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi perilaku pemilih di Indonesia. Seperti halnya orientasi pemilih yang terdiri atas beberapa faktor sebagaimana dijelaskan dalam Adman Nursal dibawah ini diantaranya adalah:

1. Orientasi agama

Agama merupakan salah satu faktor penting pembentukan perilaku pemilih di Indonesia, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa agama memiliki korelasi nyata dengan perilaku pemilih. Kenyataan bahwa dukungan terhadap gagasan partai Islam berkaitan erat dengan ketaatan pemilih dalam menjalankan ibadah diperkuat oleh penelitian Afan Gaffar

²⁰Asfar Muhammad, "Pemilu dan Perilaku Pemilih 1955-2004". (Jakarta : Pustaka Eureka, 2006) h. 144-149

terhadap perilaku pemilih di pedesaan Jawa dan penelitian Suwondo terhadap perilaku pemilih masyarakat perkotaan Bandar Lampung.

Korelasi ini dapat dilihat dimana terdapat kecenderungan yang kuat dukungan kaum santri terhadap partai Islam, untuk itu dapat disimpulkan bahwa orientasi *socio religious* mempunyai korelasi nyata terhadap perilaku pemilih, khususnya pemilih partai persatuan pembangunan (PPP) dan partai demokrasi Indonesia (PDI) pada tahun 1992. Meskipun pasca orde baru korelasi antara *socio religious* dan pilihan politik mencair, penelitian Liddle dan Saiful Mujani menyimpulkan bahwa antara perbedaan agama diantara pemilih mempunyai korelasi signifikan, walaupun lemah terhadap perbedaan pemilihan partai.

2. Kelas sosial dan Kelompok sosial lainnya

Faktor kelas sosial dapat dianggap penting oleh partai politik. Hal ini dapat dilihat pada pendukung Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dimana mereka mengaitkan PDI sebagai partai wong cilik, dan hasil penelitian Afan Gaffar juga menyatakan bahwa 13% responden menyatakan bahwa PDI adalah partai yang mewakili kepentingan kalangan miskin. Faktor sosial lainnya yang juga menjadi perhatian penting terkait pilihan politik adalah usia dan jenis kelamin.

3. Faktor kepemimpinan dan Ketokohan

Pemimpin dapat dibedakan menjadi pemimpin formal (resmi) dan pemimpin informal yang biasa disebut tokoh masyarakat, tokoh adat, dan

tokoh agama. Garis kepemimpinan menjadi salah satu hal yang dapat menentukan pilihan seseorang dalam pemilihan langsung. Baik pemimpin formal maupun informal, memiliki kekuatan untuk menggerakkan masyarakat mencapai tujuan tertentu, termasuk mempengaruhi perilaku pemilih.

Dalam Adman Nursal disebutkan bahwa peranan kepala desa, kepala kelurahan dan sosok-sosok pemimpin desa lainnya diperkirakan masih tetap memiliki pengaruh signifikan dalam mempengaruhi perilaku warga desa. Pengaruh ini akan terlihat nyata dilingkungan pedesaan yang jauh dari perkotaan. Kemudian dalam Ramlan Surbakti disebutkan bahwa kepemimpinan tradisional memang menjadi salah satu pertimbangan dalam melihat perilaku pemilih di beberapa negara berkembang.

4. Faktor Identifikasi

Aspek identifikasi partai memberi pengaruh cukup kuat terhadap pilihan partai politik. Hal ini ditunjukkan oleh kesamaan pandangan responden dengan anggota keluarganya, hal lain yang mengindikasikan ini adalah adanya kesamaan antara partai yang dipilih dengan partai yang dikagumi dalam era reformasi dimana yang dipilih dalam pemilihan umum adalah kandidat secara langsung, tidak terlalu memfokuskan pilihan pada partai, identifikasi menjadi faktor penting untuk memahami perilaku pemilih.

5. Orientasi Isu

Pada pemilu era reformasi, faktor isu dan program memberi pengaruh signifikan terhadap perilaku pemilih, terutama pada pemilih kalkulatif. Disamping karena besarnya perhatian masyarakat terhadap persoalan yang dihadapi bangsa, strategisnya faktor isu disebabkan juga oleh kebebasan setiap partai politik atau kandidat untuk mengemas isu dan programnya. Pada umumnya menguatnya pengaruh faktor isu ini disebabkan oleh meningkatnya pendidikan atau daya kritis masyarakat.

6. Orientasi kandidat

Dalam pemilihan langsung, calon yang berasal dari unit wilayah pemilihan bersangkutan tentunya lebih dikenal oleh para pemilih, faktor kandidat ini akan memberi pengaruh besar terhadap perilaku pemilih. Hal ini juga dijelaskan dalam beberapa pendekatan bahwa *imagery* kandidat menjadi hal yang diperhitungkan oleh pemilih, terutama di daerah pedesaan, bagi kandidat kepala desa, *candidat personality* juga menjadi hal yang penting sebagai referensi utama bagi pemilih.

7. Kaitan dengan Peristiwa

Faktor lain yang tak bisa diabaikan adalah kaitan isu dan kandidat yang diajukan dengan peristiwa-peristiwa yang masih mempengaruhi pikiran para pemilih. Peristiwa-peristiwa yang terkait dengan perilaku pemilih tidak selalu mempunyai cakupan nasional. Peristiwa-peristiwa lokal tertentu sangat mempengaruhi perilaku pemilih di tingkat lokal.

Peristiwa lokal seringkali hanya dipahami oleh masyarakat lokal setempat dan berbeda karakternya dengan peristiwa nasional, terutama dalam pemilihan kepala desa, hal-hal yang mendasar mengenai integritas desa, peristiwa yang menyentuh kepentingan dasar bagi suatu desa akan menjadi pertimbangan bagi masyarakat untuk memutuskan pilihan.

Beberapa hal inilah yang banyak mempengaruhi pemilih untuk memutuskan pilihan dalam pemilihan langsung di Indonesia. Beberapa aspek diatas juga dapat ditemukan pada perilaku pemilih masyarakat *Pekon Kuripan* dalam pemilihan peratin tahun 2009.²¹

2.4 Kerangka Pemikiran

Pemilihan umum merupakan arena pelaksanaan kedaulatan rakyat, yang dilaksanakan secara Adil, jujur, umum, bebas dan rahasia. Sekaligus merupakan arena perebutan kekuasaan bagi partai-partai politik baik secara nasional maupun regional (daerah). Perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh partai- partai politik lewat pemilu melalui kadernya merupakan sesuatu yang dijamin dan sah berdasarkan konstitusional. Partai poitik sebagai institusi yang terorganisir tentunya memiliki basis isu perjuangan. Seperti pada partai partai yang ada di Indonesia.

Sejauh ini kalau kita melihat nilai dan basis kader yang dibangun oleh partai politik kita bias dikategorikan dalam tiga kateogori tipologi

²¹Digilib.unila.ac.id “jurnal tinjauan tentang perilaku” hal 25-27

partai politik diindonesia apabila dilihat dalam sistem dan mekanisme keanggotaannya dapat dibagi menjadi tiga, *Pertama* Partai Islam tertutup (keanggotaannya lebih diutamakan penduduk beragama Islam). Misal: PPP, PBB, PKS. *Kedua*, Partai Islam terbuka (berbasis kultur Islam dan organisasi massa Islam, tetapi proses rekrutmen anggota bersifat terbuka). Misal: PAN (Muhammadiyah), PKB (NU). *Ketiga*, Partai kebangsaan yg berwatak pluralisme dan netral agama. Misal: PDIP, Golkar, Demokrat, Gerindra, Nasdem.

Dari tipologi partai politik tersebut pada pemilihan umum tahun 2019, menjadikan partai-partai politik memainkan narasi isunya sesuai dengan landasan gerak perjuangannya. Partai yang berbasis Islam misalnya baik Islam yang tertutup maupun yang terbuka, sama sama getol memnyuarakan tentang isu politik identitas keagamaannya khususnya ditingkatan elit DPP parpol. Tidak hanya dikubu petahana yaitu Jokowi dan maruf Amin dengan barisan partai pendukungnya pasangan oenantang pun memainkan narasi politik identitas tersebut.

Secara tidak langsung isu poltik identitas yang dibangun pada pemilihan tahun 2019 akan menjadikan partai yang berbasis Islam mengalami kekalahan didaerah penduduk yang mayoritas Kristen, namun fenomena politik tersebut berbanding terbalik dengan kondisi yang ada di Kabupaten Mamasa yang penduduknya merupakan mayoritas penganut agama Kristen protestan. Dimana pada saat pileg 2019 partai Islam di

mamasa mampu memperoleh kursi sampai 30% lebih dari total kursi DPRD Kabupaten Mamasa yang berjumlah sebanyak 30 kursi.

Melihat fenomena diatas maka pada penelitian ini akan melihat bagaimana strategi partai Islam dikabupaten mamasa dalam memperoleh kursi pada pileg 2019, serta bagaimana sikap dan perilaku pemilih terhadap partai yang berbasis Islam sehingga partai Islam tetap bias memperoleh suara di wilayah yang mayoritas penduduknya beragama keristen Protestan.

2.5 Skema Pikir

